



Kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam Meningkatkan *E-Government* melalui E-Katalog Umkm (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Lokal di Kabupaten Badung

Ni Luh Vera Cantika Dewi

I Putu Dharmanu Yudartha

Juwita Pratiwi Lukman

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana

Correspondence: veracantika18@gmail.com

Abstract

This study uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. The technique for determining informants in this study uses purposive sampling. This study uses the theory of measuring the performance of public organizations according to Agus Dwiyanto (2017). The results of the study show that the performance of the Goods and Services Procurement Unit in improving e-government through the local MSME e-catalog in Badung Regency is quite good, which in productivity indicators is not optimal, there is a need for optimization of the number of human resources and cooperation. Service quality indicators are not optimal because there is still a lack of technical guidance provided to providers. The responsiveness indicator can be said to be optimal. Responsibility indicators can be said to be optimal. Accountability indicators can be said to be quite optimal. Therefore, the author recommends providing technical guidance to providers, collaborating with various parties, optimizing existing human resources through training and improving employee skills, and continuing to monitor and evaluate periodically.

Keywords: Local E-Catalog, Employee Performance, E-Government, Procurement of Goods and Services

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (2017). Hasil penelitian menunjukkan kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal Kabupaten Badung cukup baik, yang mana dalam indikator produktivitas belum optimal perlu adanya pengoptimalan terhadap jumlah SDM dan kerjasama. Indikator kualitas layanan belum optimal dikarenakan masih kurangnya bimbingan teknis yang diberikan kepada penyedia. Indikator responsivitas sudah dapat dikatakan optimal. Indikator tanggung jawab sudah dapat dikatakan optimal. Indikator akuntabilitas dapat dikatakan cukup optimal. Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk memberikan bimbingan teknis kepada penyedia, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan pegawai serta tetap melakukan monitoring evaluasi secara berkala.

Kata Kunci: E-Katalog Lokal, Kinerja Pegawai, E-Government, Pengadaan Barang dan Jasa

I. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah penting untuk menggerakkan pembangunan, terutama ekonomi. Di bidang ekonomi, mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah membantu membangun sarana prasarana dalam meningkatkan ekonomi (Adipratama et. al, 2021). Pada dasarnya, pengadaan barang dan jasa adalah proses di mana pemerintah menyediakan fasilitas publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, membelanjakan uang untuk keperluan rumah tangga, dan menyerahkan barang dan jasa kepada Masyarakat (Kuncoro, 2013). Proses pengadaan yang efisien dan transparan tidak hanya memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam proses pengadaan ini, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi standar pelaksanaannya. Perolehan barang dan jasa harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, kompetitif, adil serta akuntabel. Proses ini dimulai dari perencanaan kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) hingga selesainya semua aktivitas penyediaan barang dan jasa yang didanai oleh APBN/APBD (Mawarni et al., 2020).

Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah mulai mengadopsi sistem pengadaan elektronik yang menawarkan berbagai manfaat termasuk efisiensi, aksesibilitas, dan keterbukaan. Saat ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah berbasis *electronic government*. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebelum diberlakukan proses pengadaan berbasis *electronic government*, pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara langsung dan belum menggunakan media elektronik. Mengenai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, dahulu diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yaitu dengan pelelangan, pemilihan langsung, serta penunjukan langsung (Safiyah Inas Shafa, p. 2021).

Pelelangan yang diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan persaingan yang sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan berkualitas sesuai dengan cara dan prosedur tertentu yang telah ditentukan serta diikuti oleh pihak terkait untuk memenuhi permintaan barang dan jasa sehingga terpilih penyedia jasa yang terbaik. Sedangkan pemilihan langsung dilakukan apabila metode pelelangan sulit untuk dilaksanakan atau tidak mampu menjamin pencapaian target.

Pemilihan langsung dilakukan dengan membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang dan jasa yang memenuhi ketentuan melalui permintaan harga ulang (*price quotation*) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, agar diperoleh harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Penunjukan langsung diterapkan untuk pengadaan barang dan jasa yang berskala kecil, pengadaan barang dan jasa setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi persyaratan, pengadaan yang sifatnya mendesak atau khusus setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atau kepala lembaga pemerintah non departemen, gubernur, bupati, walikota, direksi BUMN atau BUMD, atau penyedia barang dan jasa tunggal. Dengan menerapkan proses pengadaan secara pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung membuat bertambah besarnya volume APBN dan APBD.

Seiring berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka terjadi proses peralihan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang memberikan manfaat seperti dapat menurunkan biaya transaksi serta proses pengadaan menjadi lebih cepat. Proses pengadaan secara elektronik biasa disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan sistem *e-procurement* berbasis *e-government* yang lebih dikenal di Indonesia. Berdasarkan LPSE Nasional, layanan *e-procurement* adalah satuan kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Daerah/ lembaga lain (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang maupun jasa dengan cara elektronik, serta memfasilitasi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dalam melakukan pengadaan barang ataupun jasa dengan sistem *electronic government*.

Penerapan *e-government* dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah adalah usaha pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik. *Electronic government* di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic government* yang saat ini telah mengalami pembaharuan yaitu pada

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menandakan bahwa pemerintah Indonesia concern dalam pemanfaatan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik diatur dalam peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah mengatur pengadaan elektronik barang dan jasa pemerintah pada pasal 69 ayat 1 yang berbunyi “Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung”. Dilihat dari pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perekonomian, perkembangan teknologi informasi memiliki manfaat besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam pengembangan usahanya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bisnis yang paling umum di Indonesia. UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UMKM memiliki jumlah unit usaha yang lebih besar dibandingkan dengan usaha industri berskala besar. Akibatnya, UMKM memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan berkontribusi pada ekspor nasional, investasi nasional, dan Produk Domestik Bruto (PDB) (Diani, 2022). Di tengah perkembangan teknologi informasi ini, semakin banyak pelaku UMKM yang menggunakan pemasaran digital untuk bersaing dan mempromosikan produk mereka. Supaya UMKM tetap mampu bersaing dan tidak tertindas oleh pesaing, mereka harus terus didorong (Iqbal, 2020). Salah satu inisiatif penting dalam konteks ini adalah penerapan e-katalog yang bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membuat e-katalog sebagai aplikasi belanja yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan pemerintah. E-katalog berfungsi sebagai garda terdepan sistem pengadaan pemerintah bertujuan untuk membantu organisasi pemerintah pusat dan daerah terkait pengadaan barang dan jasa (biropbj, 2022). Menurut Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, e-katalog adalah kumpulan informasi yang mencakup daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), dan informasi lainnya tentang berbagai penyedia barang dan jasa.

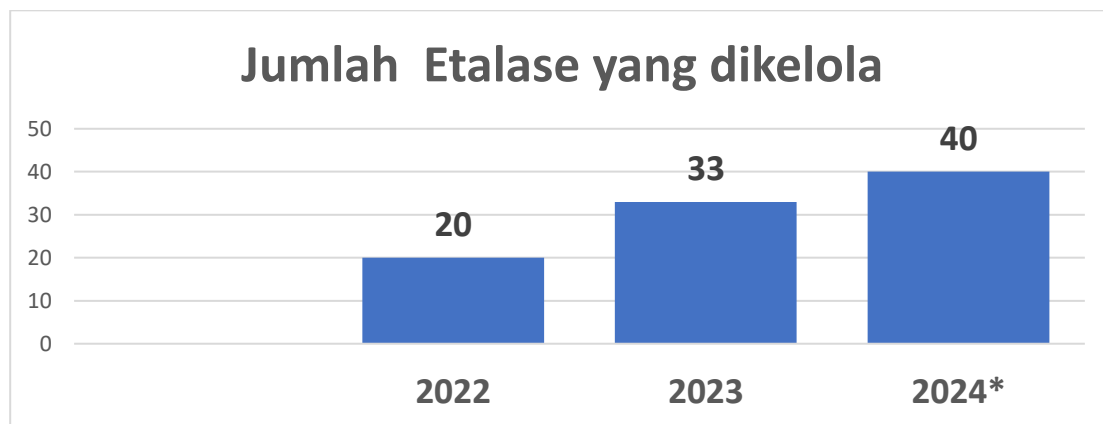
E-katalog sendiri terdapat tiga jenis yaitu e-katalog nasional, sektoral dan lokal. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan penerapan e-katalog lokal. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), jumlah produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di katalog elektronik (E-Katalog) per 16 Desember 2023 telah melampaui target awal, yaitu 7,6 juta produk (Antaranews, 2023). Tidak hanya pemerintah pusat, inovasi program e-katalog juga diterapkan pada pemerintah daerah yang disebut dengan e-katalog lokal.

Pemerintah Kabupaten Badung adalah salah satu daerah di Bali yang menerapkan e-katalog lokal yang dikelola oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. E-katalog lokal dapat diakses melalui website yaitu: <https://e-katalog.lkpp.go.id/>. Berdasarkan Keputusan LKPP Nomor 177 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik adapun tugas dan tanggung jawab Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung terkait dengan pelaksanaan e-katalog lokal yaitu: pertama, mendorong pelaku usaha lokal untuk menayangkan produk pada katalog elektronik lokal. Kedua, mengusulkan pembuatan koleksi produk kebutuhan tertentu. Ketiga, menetapkan atau membentuk kurator koleksi produk.

Implementasi E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Badung dimulai sejak 7 Juli 2021 yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 147 Tahun 2021 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/1523/SETDA tentang Penetapan Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 18 Maret 2022.

Pada awal implementasi sampai akhir tahun 2022, jumlah etalase katalog lokal Kabupaten Badung tercatat sebanyak 20 etalase dimana 19 etalase merupakan etalase yang disediakan langsung oleh LKPP dan 1 etalase yang dibuat oleh Pengelola Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Badung. Pada perkembangan selanjutnya hingga akhir tahun 2023 jumlah etalase yang dikelola mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 33 etalase dan sampai dengan triwulan kedua (Juni) tahun 2024 etalase katalog lokal yang dikelola oleh UKPBJ Kabupaten Badung menjadi sebanyak 40 etalase. Perkembangan jumlah etalase yang dikelola oleh UKPBJ Kabupaten Badung dari tahun 2022 hingga akhir Juni 2024 dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Etalase yang dikelola oleh UKPBJ Kabupaten Badung



Sumber: Laporan Kinerja E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Badung Triwulan 2, 2020

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengambil langkah inovatif dengan menerapkan e-katalog lokal untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Inisiatif ini tidak hanya memudahkan akses bagi instansi pemerintah dan masyarakat terhadap produk lokal, tetapi juga memberikan platform bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperkenalkan produk mereka secara lebih luas. Berdasarkan data realisasi *e-purchasing* katalog lokal di Kabupaten Badung tahun 2024 tercatat 1.139 UMKM yang terdaftar di e-katalog lokal dengan rincian 495 UMKM mikro, 510 UMKM kecil dan 510 UMKM Menengah. Salah satu UMKM unggulan yang berkontribusi dalam e-katalog lokal Kabupaten Badung ini adalah UMKM yang menyediakan berbagai alat tulis kantor, seperti pensil, pulpen, kertas, dan perlengkapan lainnya. Dengan memanfaatkan e-katalog lokal, UMKM ini dapat menjangkau pelanggan baru, memperluas pasar, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan UMKM ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah produk dan transaksi. Pada tahun 2023, terdapat 2.576 produk alat tulis kantor yang ditayangkan, dengan total transaksi mencapai 157. Masuk ke tahun 2024, jumlah produk yang tayang meningkat pesat menjadi 4.815, sementara jumlah transaksi juga mengalami kenaikan menjadi 185. Peningkatan ini menunjukkan bahwa alat tulis kantor telah menjadi salah satu produk unggulan di antara berbagai UMKM lainnya di Badung. Hal ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang ditawarkan, tetapi juga menegaskan peran penting UMKM dalam mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, UMKM penyedia alat tulis kantor di Badung menunjukkan potensi yang besar untuk berkembang lebih jauh dalam pasar yang semakin kompetitif.

Penerapan e-katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) Kabupaten Badung bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, akan tetapi masih terdapat permasalahan yang menghambat kinerja sistem ini dalam pengelolaannya. Kinerja adalah representasi dari kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan menetapkan tujuan tertentu (Sinambela, 2016). Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada seberapa maksimal kinerja anggotanya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil dari kombinasi usaha, kemampuan, dan pemahaman terhadap tugas yang diemban. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja seseorang meliputi agresivitas, kreativitas, rasa percaya diri,

serta kemampuan untuk mengendalikan diri. (Siagian 1988). Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, seluruh instansi Pemerintahan tak terkecuali Unit Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan informasi yang dilakukan melalui observasi secara langsung terhadap beberapa permasalahan kinerja UPBJ Sekda Badung terkait permasalahan kinerja. Permasalahan kinerja unit pengadaan barang dan jasa tersebut diuraikan sebagai berikut: Pertama, belum optimalnya e-katalog lokal Kabupaten Badung, terlihat dari adanya etalase yang belum terdapat penyedia UMKM yaitu etalase Beton. Dalam penerapannya UPBJ Kabupaten badung masih kesulitan mencari penyedia untuk mendaftar di etalase beton dikarenakan kurangnya penyedia yang berminat untuk mendaftar di etalase beton. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan produk Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang sangat bervariasi sehingga hanya berfokus pada produk yang menguntungkan dan masih minimnya UMKM penyedia e-katalog. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami tantangan yang dihadapi dan merumuskan strategi yang efektif guna meningkatkan partisipasi penyedia UMKM di etalase Beton, serta untuk mengoptimalkan e-katalog lokal secara keseluruhan.

Kedua, kurangnya bimbingan dari pihak Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) mengenai cara menempatkan produk di etalase menjadi permasalahan yang signifikan bagi penyedia, terutama dalam konteks e-katalog lokal. Dalam hal ini UPBJ hanya memberikan pelayanan dan pendampingan terkait dengan bagaimana cara pendaftaran serta melakukan verifikasi terhadap penyedia UMKM. Pada proses penempatan produk UPBJ hanya memberikan informasi untuk menempatkan produk sesuai dengan etalase yang sudah disediakan tidak memberikan *trainne* secara langsung bagaimana menempatkan produk sesuai dengan kategori yang ada di etalase.

Tabel 1 Produk yang di *take down* (turun tayang)

No	Nama Etalase	Jumlah Produk yang dilakukan <i>take down</i> (turun tayang)
1	Alat dan/atau Mesin Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	5
2	Alat Tulis Kantor Kabupaten Badung	19
3	Bahan Material Kabupaten Badung	12

Sumber: Laporan Kinerja E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Badung Triwulan 2, 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa masih banyak penyedia yang belum mengetahui mengenai cara mengelompokkan produk mereka di dalam etalase yang sudah ada. Sehingga terdapat produk yang di *take down*, diantaranya etalase alat dan/atau mesin pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan jumlah 5 produk yang di *take down*, pada etalase alat tulis kantor Kabupaten Badung terdapat 19 produk yang di *take down*, pada etalase bahan material Kabupaten Badung terdapat 12 produk yang di *take down*. Tanpa adanya panduan yang jelas oleh petugas terkait dengan tata cara memasukkan produk di etalase e-katalog membuat penyedia kesulitan menentukan kategori mana yang paling tepat untuk produk mereka.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diukur menggunakan data statistika. Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci serta melakukan studi pada situasi yang alami. Kemudian, menurut Sugiyono (2009), penelitian kualitatif deskripsi dalam penelitian disampaikan dalam melalui kata-kata, bahasa, dan konteks yang alami, serta menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan untuk

mengungkapkan gejala dan menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah bergabung pada pengamatan.

Analisis dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengolahan data, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipahami dan dipelajari oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

Dalam menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianggap valid ketika ketiga sumber data tersebut menghasilkan informasi yang konsisten. Setelah data dianggap valid, kemudian disajikan dalam berbagai bentuk, seperti data naratif, tabel, diagram, dan gambar. Penyajian data dalam berbagai bentuk ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang realitas yang terjadi, serta untuk menampilkan informasi yang relevan dan bermakna.

III. Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan dalam penelitian ini berfokus pada kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Kabupaten Badung dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Dari segi produktivitas, UPBJ Kabupaten Badung memiliki 48 pegawai, dengan empat pegawai khusus yang menangani layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Namun, jumlah tenaga kerja ini masih dinilai kurang optimal karena tidak adanya tenaga cadangan (back-up) dalam pengelolaan e-katalog. Selain itu, sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai, seperti tersedianya komputer operasional dan bidding room untuk mendukung layanan penyediaan barang dan jasa. Di sisi kebijakan, implementasi e-katalog telah didukung oleh regulasi, termasuk Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Keputusan LKPP RI Nomor 147 Tahun 2021.

Proses pendaftaran e-katalog lokal tergolong mudah dan tidak dikenakan biaya, dengan sistem LPSE sebagai platform utama. Namun, masih terdapat kendala terkait minimnya bimbingan teknis bagi penyedia dalam mengkategorikan produk pada etalase e-katalog. Akibatnya, beberapa produk mengalami take down karena tidak sesuai dengan kategori yang tersedia. UPBJ menyediakan layanan pengaduan melalui LPSE Support, yang langsung terhubung dengan LKPP RI untuk menangani kendala teknis dan administrasi.

UPBJ menunjukkan kesiapsiagaan dalam menangani kendala yang dihadapi oleh pejabat pengadaan maupun penyedia e-katalog. Beberapa tantangan yang masih ditemukan antara lain gangguan sistem, keterbatasan jumlah barang/jasa dalam katalog, dan kurangnya pemahaman penyedia mengenai sistem e-katalog. Sebagai tindak lanjut, UPBJ telah melakukan kajian dan Focus Group Discussion (FGD) dengan perangkat daerah untuk memastikan kebutuhan yang diperlukan dapat masuk dalam e-katalog.

UPBJ Kabupaten Badung telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/3143/SETDA. Adanya SOP ini membantu meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan e-katalog lokal. Selain itu, pengawasan dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi, memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan.

UPBJ menunjukkan tingkat akuntabilitas yang cukup baik melalui laporan kinerja e-katalog lokal yang diterbitkan setiap tiga bulan. Transparansi juga diwujudkan melalui publikasi informasi di media sosial dan website resmi. Meskipun demikian, transparansi dana masih terbatas pada laporan internal LKJIP.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, adapun Kinerja Unit Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Meningkatkan *E-Government* Melalui E-Katalog UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Lokal Di Kabupaten Badung yang dikaitkan dengan indikator pengukuran kinerja organisasi publik oleh Dwiyanto dalam Pasolong (2017). Indikator ini terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas yang mana berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan dalam meningkatkan *e-government* melalui e-katalog UMKM lokal di Kabupaten Badung.

A. Produktivitas

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara *input* dan *output* yang mencerminkan sejauh mana organisasi sektor publik mencapai target secara optimal. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai bagaimana organisasi publik memanfaatkan input yang tersedia guna menghasilkan output yang maksimal. Dalam penelitian ini, konsep produktivitas akan difokuskan pada kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan *e-government* melalui e-katalog UMKM lokal di Kabupaten Badung. Adapun keterkaitan indikator produktivitas dengan hasil temuan di lapangan, sebagai berikut:

1. Input

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan atau program kerja organisasi publik dapat terlaksana. Pengukuran input suatu organisasi publik dapat dilihat dari adanya SDM dan Sarana Prasarana.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran krusial dalam menjalankan tugas organisasi guna mencapai tujuan bersama. Keberhasilan SDM sebagai *input* dapat diukur dari kualitas dan kuantitasnya dalam organisasi sektor publik. Kualitas SDM merujuk pada tingkat kemampuan tenaga kerja dalam organisasi, yang dapat dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan, keahlian, keterampilan, serta pelatihan yang pernah diikuti. Sementara itu, kuantitas SDM mengacu pada jumlah anggota dalam organisasi, yang diukur dari sejauh mana jumlah tersebut mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Peningkatan *E-Government* Melalui E-Katalog UMKM Lokal Kabupaten Badung didukung oleh kualitas dan kuantitas dari pegawai Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang terlibat terutama Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang ada di Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung.

Kuantitas pegawai di Unit Pengadaan Barang dan Jasa berjumlah 48 orang yang dibagi menjadi 7 Pokja dimana masing-masing pokja berjumlah 5 orang, 9 orang staf pendukung dan 4 orang LPSE. Sesuai dengan Perpres No 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan Pokja Pemilihan memiliki tugas yakni: melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan melalui Tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

E-Katalog lokal terdapat pegawai khusus yang mengelola yaitu bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang berjumlah 4 orang diantaranya bertugas sebagai admin dan *helpdesk* pengelola sistem dan verifikator. Jika dilihat dari kuantitas jumlah orang belum cukup dan tidak ada yang *back up* karena jika terdapat salah satu pegawai yang memegang tugas tidak masuk kerja maka tugas itu tidak jalan karena berkaitan dengan hak akses

Kualitas SDM tercermin dari latar belakang pegawai Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang berpendidikan terakhir rata-rata S1 serta memiliki Keahlian dan kemampuan dalam Pengadaan. Pegawai yang bertugas di LPSE wajib memiliki sertifikat sistem ISO 9001:2015. Berdasarkan kualitas dan kuantitas dapat disimpulkan bahwa

SDM Unit Pengadaan Barang dan Jasa belum sepenuhnya memadai. Hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang masih kurang sehingga terdapat pegawai yang merangkap jabatan yang dapat menghambat pekerjaan dan hak akses pegawai yang bertugas.

b) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu dimensi penilaian input dalam suatu organisasi atau lembaga. Secara umum, sarana dan prasarana merujuk pada berbagai fasilitas yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan agar tujuan dapat tercapai. Penilaian terhadap sarana dan prasarana dapat dilihat dari sejauh mana anggaran yang tersedia serta fasilitas operasional yang ada dapat mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan dalam organisasi publik. Dalam pelaksanaan e-katalog lokal Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung memfasilitasi perangkat komputer atau laptop, akses jaringan internet yang stabil, serta fasilitas *bidding room*. *Bidding room* ini dilengkapi dengan lima unit komputer yang disediakan khusus oleh Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Badung, yang bertujuan untuk membantu penyedia atau vendor yang mengalami kesulitan dalam menjalani berbagai proses di e-katalog lokal. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan proses pengadaan menjadi lebih transparan dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat.

c) Anggaran

Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan sangat penting dalam mendukung semua kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi publik. Anggaran untuk Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengelolaan e-katalog lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan setiap tahunnya untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Anggaran ini sangat krusial karena digunakan untuk mendukung proses operasional pelaksanaan e-katalog lokal. Tanpa adanya anggaran yang memadai, efektivitas dan efisiensi sistem pengadaan barang dan jasa dapat terganggu. Berdasarkan pada Surat No 027/22630/SETDA, terdapat anggaran terkait dengan *E-Purchasing* yang mencakup e-katalog lokal dengan total anggaran senilai Rp 2.331.911.863.832. Anggaran tersebut mencakup berbagai aspek penting, termasuk pembiayaan pemeliharaan sistem, pengadaan sarana dan prasarana operasional, serta pengembangan jaringan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional e-katalog.

2. Output

Output merupakan hasil dari suatu proses kegiatan. Penilaian terhadap output organisasi dapat dilihat dari sasaran kegiatan yang ditetapkan. Sasaran kegiatan adalah target spesifik yang perlu dicapai dalam jangka waktu tertentu dan mencerminkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Output* menggambarkan jumlah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi publik dalam periode waktu yang singkat. *Output* organisasi publik dapat diukur dari sejauh mana organisasi tersebut didukung oleh peraturan atau kebijakan yang relevan, serta kualitas pelayanan yang diberikan.

E-katalog lokal di Kabupaten Badung didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Secara Elektronik yang sudah diubah berulang kali. Kalau Implementasi E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Badung dimulai sejak 7 Juli 2021 yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 147 Tahun 2021 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/1523/SETDA tentang Penetapan Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 18 Maret 2022. Peraturan tersebut menunjang kelangsungan E-Katalog Lokal di Kabupaten Badung.

Output juga dapat diukur dari adanya layanan yang diberikan. Unit Pengadaan Barang dan Jasa memberikan pelayanan kepada penyedia e-katalog lokal terkait dengan cara mendaftar di e-katalog lokal, verifikasi kebenaran data dan juga melayani pelayanan pengaduan terkait dengan kendala-kendala yang terjadi e-katalog

lokal. Berdasarkan hasil temuan dijelaskan bahwa adanya peraturan dan pelayanan dalam pelaksanaan E-Katalog Lokal di Kabupaten Badung sudah dapat dikatakan memadai, hal ini terlihat dari sudah adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur dan mendukung penerapan e-katalog lokal di Kabupaten Badung.

B. Kualitas Layanan

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator kualitas layanan berkaitan dengan seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat sebagai sasaran program kerja dalam suatu organisasi. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja organisasi karena informasi mengenai kepuasan masyarakat biasanya mudah diperoleh dan dengan biaya rendah. Jika kualitas layanan dianggap tinggi, hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja organisasi publik. Kualitas layanan berfungsi sebagai penjas mengenai kinerja organisasi dan birokrasi publik, yang tercermin dari sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui pelayanan yang memuaskan.

Penilaian terhadap kriteria layanan publik yang baik dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu persyaratan dan ekonomis. Persyaratan merujuk pada berbagai hal yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan layanan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup standar operasional, peraturan, serta infrastruktur yang diperlukan agar layanan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, aspek ekonomis menekankan pentingnya tindakan untuk memperoleh barang atau jasa dengan kualitas yang tinggi, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Ini berarti bahwa layanan publik tidak hanya harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus dilaksanakan dengan cara yang hemat sumber daya, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa membebani anggaran. Dengan demikian, kombinasi dari kedua kriteria ini persyaratan yang jelas dan pendekatan yang ekonomis merupakan pondasi penting dalam menilai kualitas layanan publik yang baik.

Indikator kualitas layanan terkait dengan peningkatan *e-government* melalui e-katalog UMKM lokal dapat diukur dari sejauh mana Unit Pengadaan Barang dan Jasa mampu mengenali kebutuhan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi penerima layanan yang dalam hal ini adalah penyedia UMKM. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan e-katalog lokal yaitu, Layanan Penyediaan Akun Penyedia. Layanan Penyediaan Akun Penyedia bertujuan untuk membantu penyedia dalam proses pendaftaran dan penyediaan akun di e-katalog lokal. Penyedia yang baru dapat mendaftar dan mendapatkan akun untuk mengakses platform.

Untuk alur dan syarat pada proses pendaftaran di e-katalog lokal tidak berbelit-belit atau menyusahkan. Penyedia memiliki akun LPSE dengan cara mendaftar menggunakan email lalu mengikuti petunjuk atau syarat yang ada pada sistem pada proses pendaftaran akun LPSE. Setelah itu mengisi data SIKAP (Sistem Informasi Penyedia) yang kemudian setelah itu dilakukan verifikasi data dan setelah itu penyedia memiliki hak akses sepenuhnya untuk menayangkan produknya. Dalam pemberian pelayanan yang disediakan oleh UPBJ dalam pengelolaan e-katalog lokal ini tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya dalam kualitas layanan, penyedia di e-katalog lokal belum terdapat pelaksanaan bimbingan teknis terkait cara memasukkan produk di etalase sesuai dengan kategori.

Saat ini, belum terdapat program bimbingan teknis yang jelas dan terstruktur yang ditujukan kepada penyedia mengenai cara mengkategorikan produk di etalase e-katalog. Tanpa bimbingan teknis yang memadai, penyedia mengalami kesulitan dalam memahami proses pengkategorian yang tepat sehingga terjadinya proses take down produk yang dilakukan oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa dikarenakan produk yang dimasukkan kurang sesuai.

Selain itu terdapat layanan pengaduan melalui website LPSE Support. Salah satu saluran untuk menyampaikan pengaduan adalah melalui website LPSE, di mana pengguna dapat mengakses layanan LPSE Support. Layanan ini menyediakan sistem tiket yang memungkinkan setiap pengaduan diproses langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Dengan demikian, penyedia dan pengguna memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

Dapat disimpulkan secara keseluruhan, kualitas layanan e-katalog UMKM lokal sudah menunjukkan perkembangan yang baik, terutama dalam hal aksesibilitas dan penyediaan layanan pengaduan. Namun, untuk mencapai standar kualitas yang lebih tinggi, perlu ada perhatian khusus terhadap bimbingan teknis dan masalah teknis yang dihadapi. Dengan melakukan pelatihan serta bimbingan teknis kepada penyedia atau pengguna, UPBJ dapat meningkatkan kepuasan penyedia UMKM dan efektivitas e-katalog dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

C. Responsivitas

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator responsivitas mencerminkan sejauh mana birokrasi publik dapat merespons dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta kemampuannya dalam mewujudkan visi dan misi lembaga atau organisasi tersebut. Responsivitas ini berkaitan erat dengan cara organisasi publik menjawab dan menangani berbagai kebutuhan serta tuntutan masyarakat yang menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, responsivitas mencerminkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinteraksi secara efektif dengan masyarakat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dan relevan. Hal ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik serta dalam upaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Responsivitas dalam penelitian ini dilihat dari kesiapsiagaan dan respon dari UPBJ untuk menanggapi permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengadaan ataupun penyedia. Hal ini berkaitan dengan tupoksi Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung terkait dengan pelaksanaan e-katalog lokal salah satunya yaitu, mengusulkan pembuatan koleksi produk kebutuhan tertentu. Dalam hal ini masih terdapat permasalahan jaringan yang error, masih terdapat kebutuhan akan barang/jasa yang belum terdaftar pada etalase katalog lokal dan juga terdapat penyedia UMKM yang belum mengerti akan sistem e-katalog lokal. Adapun tindak lanjut Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung yakni terkait dengan kebutuhan yang diperlukan oleh OPD Kabupaten Badung belum ada di e-katalog lokal sehingga diperlukan adanya kajian dan FGD (*Focus Group Discussion*) bersama-sama dengan perangkat daerah Kabupaten Badung agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem sehingga meminimalisir adanya error dan juga memberikan pelatihan kepada UMKM yang masih kurang mengerti dengan e-katalog lokal.

D. Responsibilitas

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator responsibilitas didefinisikan dengan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar baik secara eksplisit maupun implisit sesuai dengan kebijakan organisasi. Indikator responsibilitas dapat dilihat dengan bagaimana organisasi publik mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara implisit SOP dalam organisasi publik disampaikan secara tidak langsung atau dalam bentuk tertulis sedangkan secara eksplisit disampaikan secara langsung. Implisit dapat dilihat dari adanya standar profesional yang digunakan suatu organisasi. Sedangkan secara eksplisit dilihat dari adanya pengawasan dalam suatu organisasi publik. Standar profesionalisme merupakan standar yang dibentuk guna membantu jalannya kegiatan agar sesuai dengan perencanaan. Pengawasan merupakan kegiatan memastikan segala aktivitas terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Adanya standar profesionalisme terkait dengan pelaksanaan e-katalog lokal di UPBJ Badung yang berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/3143/SETDA tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung. Dengan adanya SOP ini dapat meningkatkan profesionalisme kerja dalam pelaksanaan e-katalog lokal di Kabupaten Badung. Sedangkan secara eksplisit dapat dinilai dari adanya pengawasan terhadap pelaksanaan e-katalog lokal yang diselenggarakan oleh UPBJ Kabupaten Badung. Adanya pengawasan lapangan merupakan salah satu bentuk eksplisit dari kegiatan Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengelolaan e-katalog lokal Kabupaten Badung. Pelaksanaan e-katalog lokal terdapat pengawasan yang dilakukan berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas sistem

e-katalog lokal. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan adanya standar operasional prosedur dan pengawasan dapat disimpulkan bahwa responsibilitas Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan *e-government* melalui e-katalog lokal sudah optimal.

E. Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi syarat fundamental dalam pencegahan penyelewengan kekuasaan dalam organisasi publik. Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator akuntabilitas berfungsi sebagai ukuran sejauh mana kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi salah satu indikator kinerja yang penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan kegiatan birokrasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Indikator akuntabilitas diukur dari seberapa baik organisasi melaksanakan tanggung jawabnya dan tingkat transparansi yang ditunjukkan kepada publik. Pertanggungjawaban mencakup segala bentuk kewajiban yang disusun dalam dokumen fisik, seperti laporan yang menggambarkan hasil dan proses kegiatan. Sementara itu, transparansi merujuk pada keterbukaan yang diberikan oleh organisasi publik dalam segala tindakan dan kebijakan yang diambil, yang tercermin melalui penyediaan informasi yang komprehensif terkait kegiatan mereka.

Bentuk pertanggungjawaban dari Unit Pengadaan Barang dan Jasa yaitu berupa Laporan Kinerja E-Katalog Lokal yang dibuat setiap 3 bulan sekali. Penilaian pertanggungjawaban dapat dilihat dari sejauh mana organisasi terbuka atau transparan kepada publik. Transparansi ini dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi yang disebarluaskan melalui media sosial atau website resmi organisasi publik. UPBJ Kabupaten Badung melakukan transparansi melalui publikasi segala informasi dan kegiatan terkait pelaksanaan e-katalog lokal melalui media sosial ataupun website resmi sedangkan untuk transparansi dana tidak bisa dipublish hanya sebatas pelaporan di LKjIP berdasarkan hasil temuan di lapangan adanya laporan pertanggungjawaban dan transparansi ke publik maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan *e-government* melalui e-katalog lokal UMKM Kabupaten Badung sudah optimal.

Faktor yang mempengaruhi kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan E-Government Melalui E-Katalog UMKM Lokal Kabupaten Badung

Kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi dua kategori internal dan eksternal. Faktor Internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, seperti struktur organisasi, budaya kerja, dan sumber daya manusia. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh dari lingkungan luar, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan dinamika pasar. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk secara aktif mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ini agar dapat memaksimalkan potensi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan *e-government* melalui e-katalog lokal UMKM Kabupaten Badung.

Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan *e-government* melalui e-katalog lokal UMKM Kabupaten Badung.

1. Adanya dasar hukum atau peraturan

Adanya dasar hukum merupakan faktor pendukung utama keberlangsungan kinerja dari instansi pemerintah atau organisasi sektor publik. Implementasi E-Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Badung dimulai sejak 7 Juli 2021 yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 147 Tahun 2021 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/1523/SETDA tentang Penetapan Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 18 Maret 2022. Selain itu terdapat peraturan yang memperjelas tugas dan

fungsi Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung dalam meningkatkan *e-government* melalui e-katalog lokal yaitu berdasarkan Keputusan LKPP Nomor 177 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik adapun tugas dan tanggung jawab Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung terkait dengan pelaksanaan e-katalog lokal yaitu: pertama, mendorong pelaku usaha lokal untuk menayangkan produk pada katalog elektronik lokal. Kedua, mengusulkan pembuatan koleksi produk kebutuhan tertentu. Ketiga, menetapkan atau membentuk kurator koleksi produk. Mengacu pada peraturan yang ada tentu diharapkan kinerja dari organisasi publik yakni Unit Pengadaan Barang dan Jasa untuk tampil dengan profesional dan tanggap terhadap pemberian pelayanan kepada penyedia UMKM serta Pejabat Pengadaan.

2. Adanya Standar Profesionalisme

Standar profesionalisme sangat mendukung kinerja suatu organisasi publik, karena akan membentuk etika kinerja anggota dalam organisasi tersebut sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kaidahnya. Adanya standar profesionalisme Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung berpedoman pada pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/3143/SETDA tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung. Dengan adanya SOP ini dapat meningkatkan profesionalisme kerja dalam pelaksanaan e-katalog lokal di Kabupaten Badung.

3. Adanya pengawasan

Pengawasan adalah proses memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan e-katalog lokal terdapat pengawasan yang dilakukan berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas sistem e-katalog lokal. Proses pengawasan sangat mendukung kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

4. Kualitas SDM yang memadai

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor pendukung yang krusial dalam menunjang dan menciptakan kualitas kinerja yang optimal dalam suatu organisasi. Dengan memiliki SDM yang berkualitas, organisasi dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Selain itu, pengelolaan SDM yang baik, termasuk pelatihan dan pengembangan, juga dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam organisasi. Kualitas SDM tercermin dari latar belakang pegawai Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang berpendidikan terakhir rata-rata S1 serta memiliki Keahlian dan kemampuan dalam Pengadaan. Yang mana pegawai Unit Pengadaan Barang dan Jasa sudah memiliki sertifikat kompetensi, terkhusus pada pegawai bagian LPSE sudah memiliki sertifikat kesisteman yaitu ISO 90012015. Hal ini tentu menunjang keberlangsungan kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan *e-government* melalui e-katalog lokal UMKM Kabupaten Badung.

1. Kurangnya Kerjasama

Kerjasama yang belum terjalin dengan baik mengakibatkan minimnya dukungan teknis dan pelatihan bagi UMKM dalam memanfaatkan e-katalog. Tanpa bimbingan dan pelatihan, UMKM mungkin tidak mampu memenuhi standar yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengadaan.

2. Kuantitas SDM

Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap efektivitas operasional pada bagian Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik, terutama dalam pengelolaan e-katalog lokal. Saat ini, hanya terdapat empat pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan e-katalog lokal, yang mana jumlah ini terbilang sangat terbatas. Keterbatasan jumlah pegawai ini berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan e-government melalui e-katalog lokal. Hal ini akan berpengaruh

pada kemampuan unit tersebut dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada Pejabat Pengadaan serta Penyedia e-katalog lokal.

3. Kegiatan Pelatihan Teknis Kurang Optimal

Kegiatan pelatihan teknis kepada penyedia e-katalog lokal belum dikatakan optimal karena masih terdapat penyedia yang salah memasukkan produknya dalam etalase yang dikategorikan dalam e-katalog lokal. Sehingga terdapat produk yang di *take down* atau turun tayangan karena melanggar ketentuan. Hal ini dikarenakan kuantitas SDM kurang memadai sehingga pelatihan teknis belum dilakukan secara optimal.

Rekomendasi peningkatan kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan E-Government melalui E-Katalog UMKM Lokal Kabupaten Badung

Kinerja dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks organisasi publik, kinerja berfungsi sebagai ukuran untuk menilai apakah layanan yang diberikan kepada masyarakat sudah memadai dan memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil temuan dan analisa yang telah dibuat oleh peneliti maka dihasilkan rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam peningkatan kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan E-Government melalui E-Katalog UMKM Lokal Kabupaten Badung terdapat beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan, sebagai berikut:

1. Menjalin Kerjasama Antar Pihak

Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan peningkatan e-katalog UMKM Lokal di Kabupaten Badung masih terkendala karena adanya beberapa hambatan seperti kurangnya pelatihan bimbingan teknis terkait dengan cara memasukkan produk di etalase sesuai dengan kategori. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antar pihak lainnya seperti Universitas dalam hal membantu memberikan sosialisasi atau pelatihan terkait dengan e-katalog lokal.

2. Pengoptimalan Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia tentu didukung melalui kuantitas dan kualitas dari sumber daya yang melaksanakan tugas dalam suatu organisasi publik. Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam peningkatan e-government melalui e-katalog lokal di Kabupaten Badung memerlukan peningkatan jumlah sumber daya manusia dan kompetensi dalam hal perlu adanya optimalisasi terhadap kuantitas dan kualitas dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

3. Meningkatkan Kualitas Layanan

Kualitas layanan Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan e-katalog perlu ditingkatkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada penyedia UMKM. Bimbingan ini perlu dirancang secara terstruktur, termasuk pembuatan modul pelatihan yang jelas dan mudah dipahami. Sesi praktik langsung, di mana penyedia dapat mencoba memasukkan produk dengan bimbingan dari tim UPBJ juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami proses dengan baik. Umpan balik dari penyedia setelah sesi bimbingan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program pelatihan di masa mendatang.

Selain itu, meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dan penggunaan e-katalog lokal juga sangat penting. Kampanye informasi melalui media sosial, website resmi, dan media massa dapat membantu menjangkau lebih banyak penyedia UMKM. Pertemuan rutin dengan penyedia untuk memberikan update dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi akan menciptakan komunikasi yang lebih baik. Menggunakan testimoni dari penyedia yang telah berhasil memanfaatkan e-katalog dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik perhatian penyedia lainnya.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil temuan di lapangan mengenai Kinerja Unit Pengadaan barang dan Jasa dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal Kabupaten Badung dapat disimpulkan bahwa kinerja Unit pengadaan Barang dan Jasa sudah terukur cukup baik, namun belum dikatakan optimal karena masih adanya kendala-kendala yang ditemui sehingga perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam indikator produktivitas dan kualitas layanan. Hasil ini diperoleh dengan menganalisis 5 indikator menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2018) yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian:

1. Produktivitas, pengukuran kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung melalui indikator produktivitas sangat penting untuk memahami efektivitas operasional e-katalog lokal. Dalam konteks ini, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara input yang tersedia dan output yang dihasilkan. Pada input mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. SDM yang ada di Unit Pengadaan Barang dan Jasa memiliki latar belakang pendidikan yang memadai tetapi kuantitas SDM masih kurang seperti pada bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik hanya terdapat 4 petugas sehingga mengakibatkan beban kerja yang berat dan menghambat kelancaran operasional. Terdapat Fasilitas sarana prasana dan anggaran yang menunjang pelaksanaan e-katalog lokal sudah baik dengan disediakannya ruang *bidding* dan komputer bagi penyedia dan pengguna e-katalog lokal. Output menunjukkan hasil yang cukup baik, didukung oleh peraturan yang jelas dan pelayanan kepada penyedia. Namun, pelaksanaan kinerja pada indikator produktivitas dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama dengan pihak lain, seperti lembaga pendidikan dan asosiasi UMKM yang dapat memperluas dukungan dan jaringan bagi penyedia.
2. Kualitas Layanan, terkait indikator kualitas layanan Unit Pengadaan barang dan Jasa dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal Kabupaten Badung dapat diukur dari kemampuan Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengenali kebutuhan penyedia UMKM dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Layanan Penyediaan Akun Penyedia menunjukkan kemudahan akses bagi penyedia baru untuk mendaftar dan mendapatkan akun di e-katalog, dengan proses yang tidak rumit dan tanpa biaya. Namun masih terdapat kendala yaitu kekurangan dalam hal bimbingan teknis bagi penyedia mengenai cara mengkategorikan produk di etalase. Tanpa bimbingan yang jelas, penyedia mengalami kesulitan dan berpotensi menghadapi masalah, seperti produk yang tidak sesuai dan terpaksa di *take down*. Meskipun layanan pengaduan melalui website LPSE Support sudah memadai, perhatian lebih terhadap pelatihan dan bimbingan teknis sangat diperlukan.
3. Responsivitas Unit Pengadaan barang dan Jasa dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal Kabupaten Badung terukur cukup optimal. Responsivitas diukur dari kesiapsiagaan dan respons terhadap masalah yang dihadapi oleh Pejabat Pengadaan dan penyedia. Terdapat beberapa tantangan, seperti masalah jaringan yang sering error, kebutuhan barang/jasa yang belum terdaftar, dan kurangnya pemahaman penyedia UMKM mengenai sistem e-katalog lokal. Sebagai tindak lanjut, UPBJ berencana untuk melakukan kajian dan Focus Group Discussion (FGD) dengan perangkat daerah untuk memastikan bahwa e-katalog lokal memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, monitoring dan evaluasi sistem akan dilakukan untuk meminimalkan masalah teknis, serta pelatihan akan diberikan kepada UMKM yang masih kesulitan memahami sistem e-katalog.
4. Responsibilitas, Adanya standar profesionalisme terkait dengan pelaksanaan e-katalog lokal di UPBJ Badung yang berpedoman pada pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/3143/SETDA tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung. SOP ini berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan profesionalisme kerja dalam pengelolaan e-katalog. Selain itu, terdapat pengawasan yang dilakukan secara eksplisit, termasuk monitoring dan evaluasi oleh petugas sistem e-katalog lokal, memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa responsibilitas Unit Pengadaan Barang dan Jasa

dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog lokal sudah optimal. Penggunaan standar operasional dan adanya pengawasan yang efektif menunjukkan komitmen organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan prinsip administrasi yang benar.

5. Akuntabilitas Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Kabupaten Badung menunjukkan akuntabilitasnya melalui Laporan Kinerja E-Katalog Lokal yang disusun setiap tiga bulan. Transparansi juga diupayakan melalui publikasi informasi terkait pelaksanaan e-katalog lokal di media sosial dan website resmi. Walaupun transparansi terkait dana terbatas pada pelaporan di LKJIP, keberadaan laporan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi menunjukkan komitmen UPBJ dalam menjaga akuntabilitas. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog lokal UMKM Kabupaten Badung sudah optimal. Hal ini tercermin dari upaya mereka dalam menyediakan laporan, transparansi informasi, serta keterbukaan kepada publik, yang semuanya mendukung kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Saran

Pencapaian kinerja organisasi yang sudah sesuai dengan yang diharapkan tetap harus dipertahankan. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa permasalahan, untuk ini peneliti menyampaikan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Unit Pengadaan Barang dan Jasa terkait dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM lokal Kabupaten Badung. Saran tersebut diantaranya:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada khususnya sumber daya manusia yang dapat menunjang kegiatan e-government melalui e-katalog UMKM lokal Kabupaten Badung.
2. Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Badung diharapkan dapat memaksimalkan pelatihan teknis bagi penyedia UMKM dalam hal memasukkan produk di etalase e-katalog lokal Kabupaten Badung.
3. Kepada peneliti lainnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini sehingga diperoleh temuan yang optimal sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Adipratama, E., & Husnatarina, F. (2021). Kinerja pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 2(1), 35-43.
- Antaranews. (2023). *LKPP: Produk UMKM yang tayang di e-katalog capai 7,6 juta produk*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/>: <https://www.antaranews.com/berita/3891108/lkpp-produk-UMKM-yang-tayang-di-e-katalog-capai-76-juta-produk>
- biropbj. (2022). *E Katalog LKPP: Pengertian dan Panduan Lengkap Cara Daftar Jadi Penyedia!* Retrieved from <https://biropbj.ntbprov.go.id/>: <https://biropbj.ntbprov.go.id/v2/e-katalog-lkpp-pengertian-dan-panduan-lengkap-cara-daftar-jadi-penyedia/>
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government.
- Iqbal, M. (2020). PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM. *Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1*, 77-97.
- Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 027/1523/SETDA tentang Penetapan Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung.
- Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81-92.
- panrb. (2022). *Akselerasi Digitalisasi Pelayanan Publik melalui MPP Digital*. Retrieved from <https://www.menpan.go.id/>: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-digitalisasi-pelayanan-publik-melalui-mpp-digital>
- Pasolong, & Harbani. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Presiden Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
- Prabawati. (2023). *Transformasi Digital Pelayanan Harus Utamakan Kepentingan Publik*. Retrieved from <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/>: <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/transformasi-digital-pelayanan-harus-utamakan-kepentingan-publik>
- Shafa, S. I., Nurhidayati, T., & Damanik, A. F. (2021). Analisis Penerapan E-Procurement sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 2(1), 1-9.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala LKPP RI Nomor: 147 Tahun 2021 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kabupaten Badung.
- Umulkulsum, D., Suaji, D. A., & Achmad, R. (2020). The effect of benefits and work discipline on employee productivity at the Geological Survey Center Bandung. *Technium Soc. Sci. J.*, 14, 454.